



**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
AGGARAN 2017
(Studi Pada Desa Hilimboe Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan)**

Matius Bangun¹

Berkat Gowasa²

Universitas Darma Agung Medan^{1,2}

Corresponding Email : mbreserach28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 dan pmanfaatannya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Hilimboe Kec. Susua Kab. Nias Selatan. (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Hilimboe Kec. Susua Kab. Nias Selatan.

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 dan pmanfaatannya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Hilimboe Kec. Susua Kab. Nias Selatan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat dalam sistem sosial secara keseluruhan guna kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, karenanya lingkup pembangunan meliputi mengadakan, membuat atau mengatur suatu yang belum ada. (2) Kinerja dan kemampuan kepala desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. (3) Pembangunan yang ada di desa Hilimboe hingga saat ini masih belum cukup dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi terutama dalam hal memulihkan fungsi bangunan yang selama ini sudah tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menganut asas Otonomi Daerah, dimana kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah juga diartikan sebagai kemampuan mengurus atau mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ramlan, 2007:147).

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas Gubernur, Bupati/walikota, Kepala Camat Serta Kepala Desa, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang telah diatur di dalam Undang - Undang NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa Pemerintah Dearah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi yang di dalamnya terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Walikota yang didalamnya lagi



terdapat Pemerintah Kecamatan, serta didalam Pemerintah Kecamatan Terdiri dari bagian terdekat dengan masyarakat yaitu Pemerintah Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa itu sendiri juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa berdasarkan Undang Undang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kewenangan desa yang telah di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil di Indonesia yang hubungannya sangat dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Perwakilan Desa, serta beberapa Kaur dan perangkat lainnya. Perangkat Desa tersebut sama-sama bersama masyarakat untuk membangun desanya agar dapat berkembang bahkan menjadi desa terbaik.

Tolak ukur sebuah negara maju dapat dilihat dari Desa yang maju terlebih dahulu, karena itu desa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemimpin Negara berhasil atau tidaknya. Tolak ukur tersebut dapat meliputi dalam beberapa aspek penilaian yakni : Infrastruktur yang baik, kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi, tingkat pendidikan yang relatif tinggi, aspek kesehatan yang baik juga tentunya, pembangunan secara fisik maupun yang non fisik. Hal-hal tersebutlah yang menjadi instrumental penilaian Desa yang baik. Pembangunan masyarakat desa akhir akhir ini oleh Pemerintah Pusat sangat di tekankan karena dengan membangun Desa sama dengan mensnyukseskan pembangunan Daerah maupun Negara.

Pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa (Apriliani, 2014:37).

Dewasa ini perubahan paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam kemunculan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika membahas tentang pembangunan. Suharto, (2010:57) mengungkapkan bahwa: secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' yang berarti daya atau kekuasaan.

Pemerintahan sebagai puncak kekuasaan dalam rangka pembangunan daerah melalui pemerintah daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) diberi kewenangan melalui asas desentralisasi mengatur rumah tangganya sendiri untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam hal ini Undang-Undang juga menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus semua penyelenggaraan pemerintah untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta otonomi nyata dan bertanggung jawab.



Pada umumnya masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan desanya. Selain itu, masyarakat dituntut berkreatifitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah dengan maksud dan tujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menerangkan bahwa desa sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengolah dirinya sendiri yang disebut *self governing community*.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, programpun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, hal tersebut adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai kearifan lokal dan modal sosial kegotong-royongan yang saat ini mulai terkikis.

Dana Desa (Kemendes, 2017) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perkembangan kehidupan pemberdayaan masyarakat. Dengan dana desa tersebut merupakan bentuk partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa, walaupun di dalam Undang-undang otonomi daerah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa pemerintah pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah dikarenakan sebagian besar masyarakatpun belum mengetahui persepsi dan peran partisipasi masyarakat dari dana desa tersebut. Rakhmat, (2011:50) mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.

Dalam hal ini tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu persepsi individu yang berkelompok dalam lingkungan masyarakat bisa juga di sebut dengan persepsi masyarakat, persepsi masyarakat merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Suatu program kegiatan akan berjalan lancar dan mencapai tujuan apabila masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan persepsi dan partisipasi yang positif.

Pidarta dalam Mubyarto, (2004:35), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pentingnya partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat



belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Persepsi masyarakat sendiri masih kurang dalam pemahaman dan menghadapi aplikasi partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan partisipasi dan pemberdayaan sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selain itu, keuangan Desa merupakan semua penerimaan aset desa yang dapat dirupiahkan yang dikelola oleh Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Keuangan Desa yang memiliki banyak sumber tersebut perlu pengelolaan Keuangan secara baik. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012:91).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.

Untuk tahun 2017, Kabupaten Nias Selatan mendapatkan dana desa dari Kementerian Desa sebesar Rp 346 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan memperoleh lebih kurang Rp 720 juta berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dipastikan akan dicairkan bulan April melalui rekening daerah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Induk Laia saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jalan Arah lagundri (Km 7), Kecamatan Fanayama, Nias Selatan, Kamis (30/3/2017). Kabupaten Nias Selatan mendapatkan jatah Rp 346 miliar dana desa yang bersumber dari APBN dan ditargetkan pada April ini akan dicairkan ke rekening desa,” kata Induk. Besaran dana desa yang akan diterima setiap desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, didasarkan pada jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan dana tersebut, kata Induk, akan dibuat peraturan bupati yang berpedoman pada PP No 22/2015 dan Perpres No 36/2015. Selain itu, untuk setiap pencairan ke desa, para kepala desa menyiapkan dokumen, seperti LKPJ tahun 2016, RKP Desa, dan APBDes, (<https://kabarnias.com/featured/2017-kabupaten-nias-selatan-terima-rp-346-miliar-dana-desa-7875>). Berikut adalah nama-nama serta jumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan :

Gambar 1. Nama-Nama Desa Wilayah Kecamatan Susua Kab. Nias Selatan

No.	Kode POS ↑	Desa, Kelurahan ↑	Kecamatan, Distrik ↑	DT2 Kota, Kabupaten ↑		Provinsi ↓
				DT2 ↓	Kota, Kabupaten ↑	
1	22873	Bintang Baru	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
2	22873	Dao-dao Zanuwo	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
3	22873	Hiliaduloso	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
4	22873	Hilianaa Susua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
5	22873	Hilidanayao	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
6	22873	Hilimboe	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
7	22873	Hilimboho	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
8	22873	Hiliorahua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
9	22873	Hilioru dua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
10	22873	Hilisibohou	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
11	22873	Hilitobara Susua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
12	22873	Hiliwaebu	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
13	22873	Hilizamurugo	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
14	22873	Orahili Boe	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
15	22873	Orahili Susua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
16	22873	Orahua Uluzoi	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
17	22873	Sifalago Susua	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara
18	22873	Sisobahili	Susua	Kabupaten	Nias Selatan	Sumatera Utara

Sumber : *Data Primer, 2017*

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peneliti melakukan survei awal di lokasi penelitian, baik melalui wawancara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat maupun pengamatan secara langsung tentang bagaimana hasil pembangunan infrastruktur serta dampak daripada kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 yang bernilai sekitar Rp 800 juta untuk pengembangan inftstruktur desa Hilimboe Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan demi kemajuan perekonomian dan pemeberdayaan masyarakat.

Adapun persoalan yang ditemukan peneliti untuk sementara waktu daripada hasil survei awal tersebut adalah :

1. Masyarakat desa Hilimboe tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan.
2. Masyarakat tidak diberitahukan secara menyeluruh berapa jumlah dana yang diterima oleh Kepala Desa dan masyarakat desa tersebut tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan baik perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Tidak ada kemajuan pembangunan selama kepemimpinan Kepala Desa tersebut.
4. Transparansi anggaran oleh kepala desa yang tidak dilakukan di desa Hilimboe.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 dan peminfaatannya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Hilimboe Kec. Susua Kab. Nias Selatan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kepala Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Hilimboe

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: ”ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”.

Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa : “Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja”. Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.

Berdasarkan pemaparan teori di atas, maka peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan sekaligus melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang dibutuhkan untuk menjelaskan hasil kinerja kepala desa yang ada di desa Hilimboe. Berikut adalah hasil dari wawancara yang saya lakukan dengan narasumber di lokasi penelitian yaitu dengan Bapak Ketua BPD Faduhusa Laia :

“Menurut saya sebagai ketua BPD di desa Hilimboe, bahwa hasil kinerja kepala desa hingga saat ini sudah cukup baik. Hal itu saya katakan, kepala desa mampu melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang ada di desa. Selain itu, kepala desa juga mampu mewujudkan secara bertahap program yang ada di desa, seperti masuknya aliran listrik di desa, penghubung jalan (Rabat Beton) dari desa Hilimboe dengan jalan umum, MCK, dll. Namun, ada juga beberapa hal yang menjadi kelemahan daripada kepala desa ini, dimana penempatan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang sudah ada masih belum maksimal. Misalnya, gudang air bersih yang hingga saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat desa sejak dibangun tahun 2010”. (Rabu, 25 Juli 2018, Pukul 09:50 WIB, di kantor kepala desa Hilimboe).

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh ketua BPD desa Hilimboe di atas, maka dapat dianalisis bahwa kinerja kepala desa dalam memajukan pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe demi kesejahteraan masyarakat hingga saat ini masih belum maksimal.



Hal itu dapat dikatakan karena pembangunan yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi di desa Hilimboe masih banyak pembangunan yang sudah ada tidak dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Seperti, gudang air bersih yang hingga saat ini masih belum dinikmati oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa sebagai penanggungjawab utama atas pembangunan tersebut.

Kemampuan Kepala Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Hilimboe

Robbin (2007:57) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan (Ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pada dasarnya kemampuan terdiri atas dua kelompok faktor, Robbin (2007:57) yaitu:

1. Kemampuan intelektual (intellectual ability) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah.
2. Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

Dari penjelasan teori di atas, maka saya melakukan pemantauan dan pengamatan serta wawancara dengan wakil ketua BPD di desa Hilimboe yaitu Bapak Fatolosa Laia. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Menurut saya, kemampuan kepala desa baik secara intelektual maupun secara fisik sudah cukup baik. Hal itu dapat saya katakan karena kepala desa Hilimboe selalu belajar dan mempelajari tugas-tugasnya dan juga cara melaksanakan setiap program desa sesuai dengan aturan serta mampu menaungi masyarakat desa untuk ikut serta dalam setiap program desa. Selain itu, Kepala Desa Hilimboe juga memiliki wawasan dan pemikiran-pemikiran yang luas dan inovatif khususnya dalam menunjang pembangunan infrastruktur desa serta mampu mengarahkan dan berbaur dengan masyarakatnya untuk memahmi aspirasi masyarakat desa dan kebutuhan desa tersebut. Di samping itu, secara fisik juga dapat diandalkan karena masih memiliki umur yang ideal yaitu 47 tahun dan tubuh yang sehat dan kuat”. (Kamis, 26 Juli 2018, Pukul 09:30 WIB, di rumah Bapak Fatolosa Laia di desa Hilimboe).

Dari hasil pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa kemampuan kepala desa Hilimboe yang berpedoman pada kemampuan intelektual maupun fisik masih dalam keadaan baik. Seiring dengan pernyataan tersebut di atas, peneliti juga dapat menilai bagaimana kemampuan kepala desa Hilimboe bahwa hasil kemampuan yang dimiliki kepala desa akan tercermin dengan hasil yang ada di desa Hilimboe. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa juga banyak menghasilkan program-program yang baik untuk memajukan pembangunan infrastruktur desa Hilimboe. Seperti,



pembangunan jalan (rabat beton) yang menghubungkan jalan dari desa Hilimboe ke jalan raya/jalan umum, masuknya aliran listrik ke desa Hilimboe, dll. Walau masih banyak program-program kepala desa yang belum terlaksana.

Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Desa Hilimboe

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan, dan tanah.

Berdasarkan teori di atas, maka saya melakukan wawancara, sekaligus pengamatan di lokasi penelitian guna memperoleh informasi secara detail dan memahami persoalan-persoalan yang ada di desa Hilimboe terlebih permasalahan infrastruktur yang selalu menjadi kendala hingga saat ini. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan yaitu Bapak Adilman Laia :

“Menurut saya dan sesuai dengan hasil atau fakta yang ada di lapangan, bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa Hilimboe masih banyak yang seharusnya dibenahi untuk kemajuan desa Hilimboe demi kemakmuran rakyat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di desa Hilimboe adalah sebagai berikut :

1. MCK 2 Unit,
2. Rabat Beton 1000 meter,
3. Pembangunan jalan telefor/Onderlakh,
4. Jaringan Telepon Desa,
5. Listrik/PLN masuk desa,
6. Gudang Air bersih 2 unit.

Dari penjelasan Bapak Kepala Urusan Pembangunan (Kaur) desa Hilimboe di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian adalah benar adanya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, perlu ada yang dibenahi demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dan peningkatan akses taraf hidup masyarakat tersebut dimana masyarakat sebagai tujuan dan sasaran daripada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana yang perlu dibenahi adalah seperti tempat pelayanan kesehatan atau PusKesMas (PosYanDu), jalan menuju lokasi tempat sekolah yang jauh dan hanya melewati jalan setapak dan juga kantor kepala desa yang jelas.

Kondisi Pembangunan Infrastruktur Desa Hilimboe

Berdasarkan hasil pengamatan saya di lokasi penelitian dan juga hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber dari pihak masyarakat desa Hilimboe yang mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Berikut hasil wawancara saya dengan narasumber yang mewakili beberapa orang masyarakat desa yang juga memberikan pernyataan yang sama yaitu dengan Bapak Fatagosi Laia, S.Pd :

“Menurut saya, bahwa kondisi pembangunan infrastruktur desa Hilimboe hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal saya katakan, ketika pembangunan yang ada tidak dapat memberikan



dapampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Padahal, tujuan daripada pembangunan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Memang kita akui, bahwa pembangunan yang ada di desa Hilimboe sudah cukup banyak, tetapi banyak dari pembangunan yang sudah ada tidak dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti MCK yang tidak terurus, gudang air bersih yang tidak bisa digunakan hingga saat ini”. (Kamis, 26 Juli 2018, Pukul 09:30 WIB, Di rumah Bapak Fatagosi Laia, S.Pd).

Dari pernyataan tersebut di atas dan sesuai dengan hasil pengamatan si peneliti di lokasi penelitian maka dapat dipahami bahwa banyak pembangunan yang ada di desa Hilimboe yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat desa Hilimboe atau bisa dikatakan tidak berfungsi lagi. Hal itu terjadi, karena pihak pemerintahan desa tidak maksimal dalam melaksanakan pembangunan yang sudah ada di desa Hilimboe. Pembangunan yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sama halnya dengan tidak memperhatikan kegunaan dan fungsi daripada tujuan pembangunan tersebut. Padahal, pembangunan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di desa Hilimboe.

Peran Masyarakat Desa Hilimboe Dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984: 237). Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peran masyarakat desa Hilimboe dalam pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan juga kemajuan pembangunan di desa tersebut, berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Hilimboe, yaitu Bapak Sekhiniwao Laia :

“Menurut saya selaku kepala desa Hilimboe, bahwa peran masyarakat desa Hilimboe khususnya dalam program pembangunan infrastruktur selama ini sudah cukup besar. Dimana, masyarakat mempunyai peranan penting untuk keberhasilan suatu program pembangunan. Peranan masyarakat yang selama ini dalam pembangunan di desa Hilimboe sangat besar dan bahkan masyarakat selalau aktif memberikan saran dan juga tenaga dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur desa Hilimboe”. (Senin, 06 Agustus 2018, Pukul 10:20, di kantor Kepala Desa Hilimboe).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe sangat banyak dan cukup menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di desa Hilimboe. Dimana, masyarakat desa Hilimboe rata-rata sudah memiliki pemikiran-



pemikiran yang maju dan berwawasan luas untuk mencapai kemajuan hidup yang lebih baik. Hal dapat dilihat bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap kemajuan dan dukungan terhadap pembangunan yang begitu aktif dan bersinergi dengan pemerintahan desa. Hal itu disebabkan oleh pemikiran dan banyaknya masyarakat yang sudah memiliki pendidikan yang baik dan tingkat kesadaran yang lebih baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe.

Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat Desa Hilimboe

Iskandar dalam Huraerah (2004:116) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran,
2. Partisipasi tenaga,
3. Partisipasi harta benda,
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran,
5. Partisipasi sosial.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe, maka sangatlah penting untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber yang berkompeten dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di desa tersebut. Berpedoman dengan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ketua BPD, yaitu Bapak Faduhusa Laia. Berikut pernyataan beliau :

“Menurut saya, bahwa partisipasi masyarakat desa Hilimboe dalam mendukung keberhasilan setiap program pembangunan sangatlah penting, dimana tujuan daripada pembangunan tersebut tentunya untuk meningkatkan akses dan mempermudah kegiatan hidup dan kelancaran aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang ada di desa Hilimboe sudah cukup baik dan masyarakat selalu mendukung program kepala desa jika bertujuan untuk hal-hal yang lebih baik. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dengan pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe, memang cukup besar dan nyata. Masyarakat selalu terlibat aktif, seperti partisipasi buah pikiran atau pendapat dalam menentukan arah pembangunan yang tepat, tenaga yang selalu siap diberikan dan juga partisipasi dalam memberikan kemahiran atau keahlian mereka dalam membantu pelaksanaan pembangunan tersebut”. (Rabu, 07 Juli 2018, Pukul 09:00 WIB, di kantor Kepala Desa Hilimboe).

Berdasarkan penjelasan bapak Wakil Ketua BPD desa Hilimboe dan juga sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dianalisis bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Hilimboe dalam mendukung keberhasilan program pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat, antusiasme masyarakat yang begitu besar dan keaktifan mereka dalam mendukung keberhasilan pembangunan di desa Hilimboe. Bahkan, masyarakat desa Hilimboe begitu kompak dan bersama-sama mendukung pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan desa. Partisipasi tersebut telah diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam buah pikiran untuk membahas arah pembangunan yang tepat, partisipasi tenaga dan juga memberikan keahlian yang mereka miliki, seperti tukang bangunan, tukang kayu, dan lain-lain.



Persepsi Masyarakat Desa Hilimboe Terhadap Kinerja Dan Kemampuan Kepala Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur

Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2001:88) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Defenisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2000 : 45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Maka dari beberapa defenisi di atas secara umum, peneliti membuat kesimpulan tentang persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap oleh indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi.

Maka dari itu, persepsi masyarakat sangatlah diperlukan guna memaparkan hasil kerja dari pelaksana program pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe yang dalam hal ini adalah perangkat desa atau Kepala Desa Hilimboe. Jumlah narasumber atau informan dari masyarakat yang saya wawancarai di lokasi penelitian adalah (10) sepuluh orang. Tetapi, peneliti hanya menampilkan (4) empat pernyataan saja dalam skripsi ini, hal itu di sebabkan karena pernyataan atau tanggapan dari informan yang (6) orang memiliki jawaban yang sama dengan narasumber yang lain. Berikut pernyataan mereka :

1. Menurut Bapak Fatagosi Laia, S.Pd, mengatakan bahwa kinerja kepala desan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya khususnya dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe hingga saat ini belum maksimal berdasarkan tingkat harapan masyarakat dengan kepemimpinan kepala desa. Hal itu saya katakan, karena masih banyak yang harus dibenahi oleh kepala desa untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di desa Hilimboe demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Desa Hilimboe sudah berdiri begitu lama tetapi masih belum begitu nampak perubahan yang terjadi terutama dari segi pembangunan. Bahkan, masih ada beberapa bangunan yang sudah ada di desa Hilimboe tetapi tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga bangunan tersebut tidak dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti, gudang air bersih yang tidak berfungsi, Pipa-pipa penyalur air ke desa yang tidak bisa digunakan maupun kondisi jalan di desa yang masih hanya jalan setapak.
2. Menurut Bapak Faatulo Laia, S.Pd, bahwa mengatakan bahwa berdasarkan hasil kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe hingga saat ini sudah cukup bagus dan baik. Hal itu dapat dikatakan bahwa kepala desa Hilimboe selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan di desa Hilimboe demi kemajuan masyarakat. Usaha kepala desa untuk meningkatkan pembangunan di desa Hilimboe, dapat dilihat dengan adanya beberapa bangunan infrastruktur, seperti rabat beton yang menghubungkan antara jalan dari desa Hilimboe ke jalan raya/jalan umum, masuknya aliran listrik ke desa Hilimboe (PLN). Memang kita akui, bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di desa Hilimboe dan juga pemanfaatan bangunan yang sudah ada untuk dinikmati oleh masyarakat umum.
3. Menurut Ibu Rostina Laia, S.Pd,K, mengatakan bahwa kinerja kepala desa tidak hanya dilihat dari bagus tidak suatu program yang dibuat oleh kepala desa, tetapi dilihat dari hasil daripada program tersebut yang sudah dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi dapat saya katakan bahwa kinerja kepala desa Hilimboe dalam menunjang pembangunan infrastruktur sudah cukup bagus dan tahap demi tahap



kepala desa Hilimboe mewujudkan hal itu dengan melaksanakan program pembangunan yang berguna bagi desa dan masyarakatnya. Pembangunan yang sudah direalisasikan oleh kepala desa hingga saat ini adalah pembangunan gudang air bersih di masing-masing dusun yang ada di desa Hilimboe, masuknya aliran listrik ke semua dusun yang ada di desa Hilimboe karena jauh dari jalan umum atau jalan raya dan juga jalan yang menghubungkan antar dusun ke dusun yang lain yaitu rabat beton yang mempermudah transportasi.

4. Menurut Bapak Faudu'aro Laia, mengatakan bahwa masyarakat adalah tujuan utama pembangunan nasional, mulai dari pembangunan pendidikan, pembangunan kesejahteraan nasional, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan fisik atau sarana dan prasarana yang sering disebut dengan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, masyarakatlah yang menjadi tim utama yang menilai hasil kinerja setiap program pembangunan dan sekaligus selaku sasaran daripada pembangunan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah dan pemerintahan desa. Jadi, menurut saya, bahwa hasil kinerja kepala desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe masih belum baik dan masih banyak kekurangan dalam tahap pemnfaatannya. Setiap pembangunan yang ada harusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi di desa Hilimboe masih banyak banyak pembangunan yang tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat hingga saat ini.

Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Hilimboe

Dalam meningkatkan pembangunan dan mencapai hasil yang maksimal tentunya harus didukung oleh banyak faktor, baik faktor dari pemerintah maupun dari masyarakat sebagai mitra utama pemerintah dalam menyukseskan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. Tentunya, sebagai penyelenggara dan penentu utama arah pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat maka pemerintah desa harus mampu menampung dan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat agar mampu mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakatnya.

Untuk mengetahui faktor yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe, maka peneliti menguraikannya ke dalam (2) dua bagian, yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal adalah merupakan hambatan atau kendala yang datang dari dalam pemerintahan atau dari pihak penyelenggara yang melaksanakan program pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor internal yang menghambat pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe yang datang dari dalam pemerintahan desa Hilimboe berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kemampuan pemerintahan desa dalam menempatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,
- b. Kurangnya koordinasi pemerintahan desa dengan masyarakat dalam memelihara bangunan yang sudah ada,



- c. Kurangnya kepedulian pemerintahan desa dalam membenahi pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe,
- d. Kurangnya pengawasan dari pihak dinas terkait dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan di desa,
- e. Kurangnya koordinasi pemerintah daerah ata dinas terkait dalam mengarahkan dan menempatkan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Faktor Eksternal

Faktor internal adalah merupakan faktor penghambat atau kendala yang terjadi dalam melaksanakan dan juga memaksimalkan program pemerintahan yang sudah direncanakan sebelumnya yang datang dari luar pemerintahan itu sendiri sebagai pelaksana atau penyelenggara sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal atau bahkan tidak terwujud.

Adapun faktor pengahambat atau kendala yang terjadi di luar pemerintahan desa Hilimboe adalah sebagai berikut :

- a. Kurang aktifnya seluruh masyarakat dalam mengontrol pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur,
- b. Keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan masih sedikit,
- c. Kurang efektifnya lembaga-lembaga di desa mengawasi kinerja pemerintahan desa,
- d. Wawasan dan tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya dukungan terhadap suksesnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak merata,
- e. Masih banyaknya masyarakat tradisional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan penjelasan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kemampuan Kepala Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat dalam sistem sosial secara keseluruhan guna kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, karenanya lingkup pembangunan meliputi mengadakan, membuat atau mengatur suatu yang belum ada.
2. Kinerja dan kemampuan kepala desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hilimboe belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi.
3. Pembangunan yang ada di desa Hilimboe hingga saat ini masih belum cukup dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi terutama dalam hal memulihkan fungsi bangunan yang selama ini sudah tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Affifiddin. (2010). *Pengantar administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.



- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru : ReD Post Press.
- Basri, Yuswar, Zainul & Subri, Mulyadi. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Byars, Lloyd L dan Rue, Leslie W. (2006). *Human Resource Management*, 8 edition. MCGraw-Hill, Irwin.
- Chandra, dkk. (2014). *Manifesto Pembaharuan Desa: Persembahan 40 Tahun STPMD "APMD"*. Yogyakarta : APMD Press.
- Gie, The Liang. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Gresita, Sherli, Apriliani. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo*. Skripsi. Universitas Jember.
- Hendarso. (2005). *Metode Dalam Data*. Jakarta : Salemba Manajemen.
- Husaini, Usman. (2011). *Manajemen. Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jalaludin, Rakhmat. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Komalasari, Kokom. (2013). *Pembelajaran Kontekstul : Konsep dan Aplikasi*. Bandung : PT Refika Adiatama.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Lestari, T. (2015). *Kumpulan teori untuk kajian pustaka penelitian kesehatan*. Yogyakarta : Nuha medika.
- Margono. (2007). *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubyarto. (2004). *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwandari, E. Kristi. (2005). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Robbins, P. Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Jakarta : Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Sanusi, Anwar. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sarwono, S.W. (2008). *Psikologi Remaja*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.
- Sutarno, NS. (2004). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suryono, Ekotama. (2010). *Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure*. Jakarta : Media Pressindo.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.



- Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- Yuwono, Sonny, dkk. (2001). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang : Bayumedia Publishing.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mustofa. (2012). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang*.

Wida, S. A. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.

(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>).

(<https://kabarnias.com/featured/2017-kabupaten-nias-selatan-terima-rp-346-miliar-dana-desa-7875>).